

Peran Kebijakan Fiskal Hijau dalam Mendorong Keberlanjutan Ekonomi Hijau

Ayu Padila*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Green fiscal policies merupakan instrumen publik berkelanjutan yang penting bagi sektor publik dalam menghadapi perubahan iklim. Mengingat krisis iklim global menimbulkan biaya ekonomi dan fiskal, transformasi hijau memerlukan kebijakan penerimaan dan pengeluaran publik yang dirancang berdasarkan prinsip ekonomi berkelanjutan yang berorientasi pada transformasi hijau. Kebijakan fiskal yang berfokus pada green economy tidak hanya mendorong peralihan dari sistem ekonomi konvensional menuju ekonomi hijau, tetapi juga mampu mengarahkan investasi dan tabungan sektor swasta ke arah yang lebih berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menekankan pentingnya kebijakan fiskal hijau dalam mewujudkan keberlanjutan ekonomi hijau dengan menggunakan metode tinjauan literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi ekonomi hijau tidak dapat terwujud secara spontan oleh sektor swasta semata, sehingga diperlukan peran aktif instrumen kebijakan fiskal dalam memberikan arahan dan insentif. Oleh karena itu, *green fiscal policies* berperan strategis dalam mendorong transformasi fiskal dan ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat hubungan antara transformasi ekonomi hijau dan kebijakan fiskal hijau.

Kata Kunci: *Green Economy, Green Fiscal Policies, Investasi Hijau, Sustainability.*

Abstract

Green fiscal policies are important sustainable public instruments for the public sector in addressing climate change. Given that the global climate crisis generates significant economic and fiscal costs, green transformation requires public revenue and expenditure policies designed in accordance with the principles of a sustainable economy oriented toward green transformation. Fiscal policies focused on the green economy not only promote the transition from conventional economic systems to a green economy, but also have the capacity to steer private sector investment and savings toward more sustainable directions. This study aims to emphasize the importance of green fiscal policies in achieving the sustainability of a green economy by employing a literature review method. The findings indicate that green economic transformation cannot occur spontaneously through private sector actions alone; therefore, the active role of fiscal policy instruments is necessary to provide direction and incentives. Accordingly, green fiscal policies play a strategic role in driving sustainable fiscal and economic transformation and in strengthening the relationship between green economic transformation and green fiscal policies.

Keywords: *Green Economy, Green Fiscal Policies, Green Investment, Sustainability.*

Latar Belakang

Transformasi ekonomi hijau merujuk pada proses peralihan menuju sistem ekonomi yang berkelanjutan secara lingkungan, di mana aktivitas ekonomi dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan dampak ekologis yang ditimbulkan. Dalam menghadapi krisis iklim global yang semakin parah, transformasi ini menjadi agenda yang sangat penting karena memiliki potensi untuk

ECONOMIE

mengurangi berbagai eksternalitas negatif yang muncul dari aktivitas ekonomi, yang mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, dan keuangan. Eksternalitas negatif tersebut meliputi polusi udara dan air, deforestasi, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta penurunan kondisi kesehatan masyarakat. Melalui transformasi ekonomi hijau, biaya lingkungan yang sebelumnya tidak tercermin dalam mekanisme pasar dapat diinternalisasi, sehingga mendorong adopsi praktik produksi dan konsumsi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Namun demikian, transformasi ekonomi hijau bukanlah proses yang instan maupun mudah untuk dicapai. Proses ini membutuhkan waktu, sumber daya keuangan yang memadai, serta dukungan kebijakan dan kelembagaan yang kuat, khususnya dalam sistem ekonomi konvensional yang masih berorientasi pada pertumbuhan jangka pendek. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan transformasi ini adalah kegagalan pasar (*market failure*), di mana pelaku ekonomi terutama sektor swasta cenderung bertindak rasional secara finansial tanpa sepenuhnya memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas yang dilakukan. Akibatnya, biaya eksternal yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi tidak tercermin dalam harga pasar, sehingga aktivitas yang merusak lingkungan tetap berlangsung.

Dalam konteks ini, kebijakan fiskal hijau (*green fiscal policies*) berperan sebagai instrumen penting bagi pemerintah untuk mengoreksi kegagalan pasar dan mengarahkan aktivitas ekonomi menuju keberlanjutan. Kebijakan fiskal hijau mencakup berbagai instrumen, antara lain insentif pajak bagi praktik ramah lingkungan, pengurangan atau penghapusan subsidi yang merugikan lingkungan, serta peningkatan alokasi anggaran publik untuk investasi pada teknologi hijau dan infrastruktur berkelanjutan. Melalui implementasi kebijakan fiskal hijau yang konsisten dan terintegrasi, aktivitas ekonomi dapat diarahkan menuju keberlanjutan ekonomi hijau, sekaligus menyeimbangkan tujuan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis peran dan proses kebijakan fiskal hijau dalam mendorong keberlanjutan ekonomi hijau serta mengkaji hubungan konseptual antara *green economy* dan *sustainability*.

Tinjauan Pustaka

***Green Economy* (Ekonomi Hijau)**

Ekonomi hijau secara luas diakui sebagai kerangka strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Ekonomi hijau berfungsi sebagai pendekatan kebijakan yang komprehensif yang bertujuan untuk mengharmonisasikan tujuan ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, sehingga mampu mengatasi keterbatasan model pertumbuhan konvensional yang sering

ECONOMIE

mengabaikan batas-batas ekologis (UNECE, 2023). Dalam praktiknya, ekonomi hijau menekankan penggunaan sumber daya alam dan energi secara efisien, pengurangan emisi karbon, serta promosi jalur pembangunan rendah karbon. Pada saat yang sama, ekonomi hijau mendorong inovasi teknologi dan adopsi teknologi yang ramah lingkungan guna meminimalkan degradasi lingkungan tanpa mengorbankan produktivitas ekonomi. Yang tidak kalah penting, ekonomi hijau juga mengintegrasikan dimensi sosial dengan mendukung pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan manusia, serta penciptaan lapangan kerja yang layak, sehingga memastikan bahwa transformasi ekonomi tidak memperburuk ketimpangan sosial, melainkan berkontribusi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (UNDESA, 2012).

Hubungan Antara *Green Economy* and *Sustainability*

Hubungan antara *green economy* dan *sustainability* bersifat saling terkait secara inheren, karena *green economy* berfungsi sebagai jalur praktis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. *Sustainability* menuntut adanya keseimbangan antara dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial guna memastikan bahwa pembangunan saat ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kerangka ini, *green growth* muncul sebagai konsep kunci yang mendorong transformasi ekonomi hijau dengan mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sekaligus menjaga modal alam. Dengan memastikan bahwa ekosistem terus menyediakan sumber daya dan layanan lingkungan yang esensial, *green growth* memperkuat fondasi kesejahteraan manusia jangka panjang dan ketahanan ekonomi (OECD, 2023). Oleh karena itu, *green economy* tidak hanya merupakan strategi lingkungan semata, melainkan sebuah pendekatan sistemik yang menyelaraskan kemajuan ekonomi dengan integritas ekologis dan kesejahteraan sosial.

***Green Fiscal Policy* (Kebijakan Fiskal Hijau)**

Kebijakan fiskal hijau merupakan instrumen kebijakan yang krusial untuk mendorong ekonomi hijau dan agenda keberlanjutan melalui pemanfaatan instrumen fiskal secara strategis. Dengan menginternalisasi eksternalitas lingkungan, kebijakan fiskal hijau membantu mengoreksi kegagalan pasar yang muncul ketika biaya sosial dan lingkungan dari aktivitas ekonomi tidak tercermin dalam harga pasar. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk mengarahkan kembali belanja publik ke prioritas yang berkelanjutan secara lingkungan, meningkatkan penerimaan negara, serta menciptakan ruang fiskal bagi investasi hijau, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) (UNEP, 2023). Lebih lanjut, kebijakan fiskal hijau memanfaatkan berbagai instrumen fiskal, seperti pajak lingkungan, reformasi subsidi, dan belanja publik yang terarah untuk mengatasi tantangan lingkungan yang mendesak, termasuk pemanasan global, pencemaran, produksi limbah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan (GFPN, 2023). Melalui intervensi fiskal yang koheren

ECONOMIE

dan dirancang dengan baik, kebijakan fiskal hijau memainkan peran penting dalam mengarahkan aktivitas ekonomi menuju keberlanjutan dengan tetap menyeimbangkan perlindungan lingkungan, efisiensi ekonomi, dan keadilan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang faktual dan sistematis mengenai permasalahan yang sedang diinvestigasi, sementara pendekatan eksploratif digunakan untuk mengeksplorasi dan mengungkapkan temuan terkait masalah yang menjadi fokus penelitian. Hasil dari kedua pendekatan ini kemudian diintegrasikan untuk merumuskan suatu konsep pemahaman yang disajikan dalam bentuk pembahasan komprehensif. Penelitian ini juga menggunakan desain penelitian *research and development*, yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research and literature review method*, yang dilakukan untuk mengevaluasi latar belakang teoritis-praktis dari *green fiscal policies* berdasarkan studi-studi yang sudah ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder. Pengumpulan data dari sumber sekunder dilakukan melalui studi literatur dari berbagai sumber mencakup buku, jurnal ilmiah, berita media massa, dan sumber informasi dari internet yang kredibel. Kerangka kerja studi ini diorganisir menjadi tiga judul utama, yakni *green economy*, hubungan antara *green economy* dan *sustainability*, dan *green fiscal policy*. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan hasil penelitian.

Hasil dan Pembahasan***Green Economy***

Green economy didefinisikan sebagai konsep ekonomi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial (UNEP, 2011). Definisi lain yang dikemukakan oleh Green Economy Coalition menggambarkan *green economy* sebagai sistem ekonomi yang tangguh yang mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat, dengan tetap beroperasi dalam batas-batas ekologis planet dan lingkungan (PBB, 2023). *Green economy* merepresentasikan suatu pendekatan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan yang memungkinkan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara lebih efektif melalui integrasi pertimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan guna meningkatkan koherensi kebijakan. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja nasional secara keseluruhan, bukan hanya berfokus pada capaian sektoral semata.

ECONOMIE

Tujuan *green economy* mencakup penciptaan sistem ekonomi yang berkelanjutan secara ekologis, menjamin penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mendorong emisi karbon yang rendah, mendukung pembangunan rendah karbon, memperkuat tata kelola lingkungan, meningkatkan efisiensi energi, menjamin keadilan sosial, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta meningkatkan kondisi hidup kelompok masyarakat yang kurang mampu (ILO, 2022).

Green economy mengadopsi perspektif jangka panjang dengan menitikberatkan pada cara pemanfaatan sumber daya untuk menciptakan nilai bagi masyarakat. Konsep ini tidak terbatas pada transisi menuju sumber energi rendah karbon, tetapi juga menekankan peningkatan efisiensi dan kecukupan sumber daya guna mendorong penciptaan kesejahteraan, ketahanan, dan kemakmuran bagi generasi saat ini dan mendatang, dengan tetap menghormati batas-batas ekologis planet. Dari investasi yang berorientasi pada kesejahteraan hingga praktik-praktik berkelanjutan, *green economy* bersifat inklusif dan non-diskriminatif, serta menawarkan model pembangunan yang mampu menurunkan risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya secara signifikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan (Enel X, 2023).

Dalam praktiknya, berbagai metode digunakan untuk menerapkan langkah-langkah dalam kerangka *green economy*. Selain regulasi dan standar lingkungan, metode tersebut meliputi skema sertifikasi, pengelolaan sumber daya alam terpadu, reformasi keuangan lingkungan, praktik berkelanjutan, serta instrumen ekonomi dan keuangan yang dirancang untuk mendorong investasi. Menurut UNDESA (2012), kerangka kebijakan perlu memprioritaskan penyederhanaan struktur insentif, pemberian insentif bagi infrastruktur berkelanjutan, serta fasilitasi investasi pada sumber daya alam. OECD (2023) menekankan implementasi instrumen kebijakan melalui kerangka dua pilar, yaitu: pertama, penciptaan kondisi pendukung yang secara simultan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan konservasi modal alam; dan kedua, penerapan kebijakan yang mendorong efisiensi penggunaan sumber daya sekaligus meningkatkan biaya polusi bagi pihak pencemar. Mengingat perbedaan kondisi nasional, tidak terdapat pendekatan *one-size-fits-all* dalam strategi pertumbuhan hijau, sehingga kebijakan perlu disesuaikan dengan konteks politik dan ekonomi masing-masing negara.

Bank Dunia (2011) selanjutnya menegaskan bahwa pertumbuhan hijau yang efektif paling baik dicapai melalui kombinasi berbagai instrumen kebijakan, termasuk kebijakan berbasis harga, standar dan regulasi, produksi publik dan investasi langsung, penciptaan serta penyebaran pengetahuan, pendidikan dan dorongan moral, serta kebijakan industri dan inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, UNEP (2011) menekankan pentingnya memprioritaskan investasi dan pengeluaran

ECONOMIE

publik, menerapkan instrumen pajak dan pasar secara sinergis untuk mendorong investasi dan inovasi hijau, serta meningkatkan investasi dalam pembangunan kapasitas, pendidikan, dan pelatihan.

Tabel 1. Alat dan Instrumen *Green Economy*

Alat	Instrumen
<i>Internalising Externalities</i>	1. Pajak, biaya, pungutan, dan tarif atas “hal-hal yang merugikan” (misalnya polusi, penggunaan sumber daya, atau aktivitas yang merusak lingkungan). 2. Sistem otorisasi atau sertifikasi perdagangan hijau.
<i>Incentivising</i>	1. Insentif investasi (pinjaman berbunga rendah, pembiayaan mikro, pembebasan pajak). 2. Subsidi, <i>feed-in tariffs</i>, dan bentuk dukungan langsung lainnya untuk barang yang bermanfaat bagi lingkungan. 3. Penghapusan distorsi kebijakan dan insentif yang merugikan (misalnya subsidi yang merusak lingkungan). 4. Mekanisme pemanfaatan keuangan, termasuk Kemitraan Publik–Swasta (<i>Public–Private Partnerships/PPP</i>), jaminan jangka panjang, skema dukungan bertahap, penghapusan hambatan terhadap <i>Foreign Direct Investment (FDI)</i>, pengurangan beban administratif, dan jaminan pinjaman.
<i>Institutions</i>	1. Regulasi, termasuk norma, standar, pengungkapan informasi, pelabelan, larangan, denda dan sanksi, serta target wajib. 2. Hak kepemilikan dan hukum akses, termasuk hak kekayaan intelektual. 3. Tata kelola dan kapasitas institusional, termasuk akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, dan upaya anti-korupsi.
<i>Investment</i>	1. Pengadaan publik berkelanjutan. 2. Investasi dalam modal alam, seperti <i>Payments for Ecosystem Services (PES)</i>, kawasan lindung, pengelolaan langsung, dan restorasi ekologi. 3. Investasi dalam pertanian berkelanjutan. 4. Investasi dalam modal manusia, termasuk pembangunan kapasitas, pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. 5. Investasi dalam infrastruktur, termasuk energi, air, transportasi, pengelolaan limbah, serta teknologi informasi dan komunikasi (<i>Information and Communication Technology/ICT</i>). 6. Investasi dalam inovasi, termasuk penelitian dan pengembangan (<i>Research and Development/R&D</i>), diseminasi, dan berbagi pengetahuan.

ECONOMIE

Alat	Instrumen
Information	1. Pendekatan sukarela, seperti penyediaan informasi, pelabelan, tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility/CSR</i>), target, perjanjian, dan inisiatif pelatihan. 2. Alat pengukuran kemajuan, termasuk akuntansi hijau, target dan indikator hijau, serta inventaris karbon.
Inclusion	1. Kebijakan pasar tenaga kerja, termasuk pelatihan keterampilan, bantuan pencarian kerja, dukungan pendapatan, dan bantuan sosial. 2. <i>Social protection floors</i>, termasuk asuransi pengangguran dan pensiun, transfer tunai, kompensasi atas kenaikan harga, serta layanan kesehatan.

Sumber: UNDESA, 2012

Beragam alat tersedia untuk mendukung transformasi menuju *green economy*. Pemanfaatan instrumen-instrumen tersebut secara efektif dapat mempercepat transformasi ekonomi hijau secara signifikan, sementara pemilihan alat dan instrumen kebijakan tertentu sangat bergantung pada prioritas pemerintah, kapasitas institusional, dan preferensi politik. Dengan mengombinasikan instrumen fiskal, regulatif, institusional, dan berbasis investasi, pemerintah dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan secara lingkungan sekaligus memenuhi tujuan inklusi sosial dan pembangunan ekonomi.

Hubungan Antara *Green Economy* and *Sustainability*

Transisi menuju *green economy* yang inklusif pada dasarnya didasarkan pada restrukturisasi ekonomi dan sosial menuju gaya hidup berkelanjutan, yang mencakup perubahan dalam pola produksi dan konsumsi, arus investasi, serta struktur ketenagakerjaan. Dari perspektif ketenagakerjaan, transformasi ekonomi hijau memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja hijau baru tanpa menggantikan pekerjaan yang telah ada, sekaligus berkontribusi terhadap penurunan signifikan emisi karbon, timbulan limbah, dan berbagai bentuk polusi lainnya (EU, 2023).

Green economy memainkan peran yang krusial dalam menjamin *sustainability* lingkungan. Dalam konteks ini, *green growth* dapat dipahami sebagai konsep yang mendorong transformasi *green economy* dengan mempromosikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sambil memastikan bahwa aset alam tetap menyediakan sumber daya dan layanan lingkungan yang esensial bagi kesejahteraan manusia (OECD, 2023). *Green growth* bertujuan untuk membangun struktur ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui dorongan terhadap investasi dan inovasi. Agar dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan, *green growth* harus didukung oleh tata kelola yang baik, transparansi, dan keadilan sosial (Green Policy Platform, 2023).

ECONOMIE

Pemisahan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan secara tegas ditekankan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya Tujuan 8. Pada tahun 2015, negara-negara di seluruh dunia mengadopsi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup 17 SDGs. Tujuan-tujuan ini mengakui bahwa pengentasan kemiskinan harus berjalan seiring dengan strategi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan sosial seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja, serta penanganan tantangan lingkungan termasuk polusi dan perubahan iklim. Hubungan ini menjadi penting karena adanya kausalitas yang melekat antara sistem ekonomi dan ekologi. Penguatan keterkaitan tersebut akan memperkuat tujuan yang telah ditetapkan untuk mencapai transformasi *green economy* (Söderholm, 2020).

Pembangunan berkelanjutan merupakan prinsip utama yang mendasari inisiatif *green growth* untuk meningkatkan *sustainability* lingkungan sekaligus mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam. *Green growth* terus diupayakan sebagai jalur menuju perekonomian yang tangguh, rendah karbon, dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Oleh karena itu, investasi perlu diarahkan pada kegiatan yang berorientasi pada *green growth* guna melindungi sumber daya alam bagi generasi saat ini dan mendatang, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta meningkatkan kualitas lingkungan demi mendukung kesejahteraan masyarakat. Tata kelola yang baik memegang peran sentral dalam menghadapi tantangan terkait iklim, terutama melalui harmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mampu menghasilkan dampak sosial yang positif.

Dari perspektif sosial, model *green economy* yang berkelanjutan memberikan berbagai manfaat. Dengan mengurangi eksternalitas negatif melalui transformasi *green economy*, keberlanjutan mata pencaharian individu menjadi lebih terjamin karena sumber daya alam dimanfaatkan secara efisien dan berkelanjutan. Perbaikan kualitas lingkungan juga berkontribusi pada penurunan biaya kesehatan publik dan individu melalui pengurangan dampak polusi, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, penghapusan eksternalitas lingkungan dapat memengaruhi pola migrasi, membantu mencegah urbanisasi berlebihan serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Pada akhirnya, transisi menuju *green economy* dapat mendorong peningkatan ketenagakerjaan melalui pemberian insentif yang terarah untuk penciptaan lapangan kerja hijau.

Green Fiscal Policy

Green fiscal policies dapat mempercepat transformasi ekonomi hijau dengan menyelaraskan kebijakan fiskal dan penganggaran dengan prioritas pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, tujuan *green fiscal policies* (GFPN, 2023) adalah: (1) mendorong pengembangan dan penggunaan

ECONOMIE

green technologies; (2) mengurangi penggunaan teknologi yang mencemari; (3) mengurangi penggunaan bahan bakar fosil; (4) memastikan pengembangan *green infrastructure*; (5) memastikan efisiensi dalam alokasi sumber daya yang berorientasi hijau; (6) memastikan keadilan dalam distribusi pendapatan; dan (7) memastikan pertumbuhan yang berorientasi hijau.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan instrumen fiskal. Dalam laporan yang disusun oleh INTOSAI (2016), instrumen *green fiscal* meliputi:

- Pajak, tarif, dan subsidi lingkungan, termasuk pajak energi dan subsidi (misalnya untuk energi terbarukan atau bahan bakar fosil);
- Kebijakan atau reformasi fiskal yang bertujuan meningkatkan pendapatan publik (misalnya *EU plastic levy* yang diberlakukan sejak 2021, berupa kontribusi nasional berdasarkan jumlah limbah kemasan plastik yang tidak didaur ulang);
- Insentif fiskal dan mekanisme keuangan yang dapat memperkuat pembiayaan sektor swasta untuk *green investment*, termasuk penerbitan *green bonds* yang ditujukan untuk mendanai proyek dengan dampak lingkungan dan iklim yang positif;
- Promosi *sustainable finance* melalui sistem klasifikasi bersama (misalnya *EU taxonomy*) yang mengidentifikasi kegiatan yang memenuhi kriteria keberlanjutan lingkungan;
- Penyelarasan pengeluaran pemerintah dengan tujuan lingkungan serta peningkatan efisiensi belanja publik atau integrasi pertimbangan iklim dalam anggaran publik;
- Pengusulan legislasi terkait energi, plastik, polusi, dan penggunaan lahan untuk mendorong *green investment*;
- Sistem perdagangan emisi.

Tabel 2. Instrumen *Green Fiscal Policy*

Dimensi Fiskal	Instrumen
<i>Public Revenue</i>	• <i>Carbon taxes</i> • <i>Environmental taxes</i> • <i>Carbon pricing mechanisms</i>
<i>Public Expenditure</i>	• <i>Green subsidies</i> • <i>Green public procurement</i> • <i>Green infrastructure investment</i>
<i>Public Debt</i>	• <i>Green bonds</i> • <i>Green finance instruments</i>
<i>Budgeting</i>	• <i>Green expenditure audits</i> • <i>Climate budget tagging</i>

Sumber: OECD, 2023

Dampak *green fiscal policies*, sebagaimana disoroti oleh GFPN (2023), tercermin dalam kemampuannya untuk memengaruhi perilaku ekonomi dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Pajak dan pungutan lingkungan berperan penting dalam memberikan sinyal harga yang jelas sehingga mendorong konsumen dan pelaku usaha untuk beralih ke model produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Pada saat yang sama, reformasi anggaran membantu menyelaraskan pengeluaran pemerintah dengan tujuan lingkungan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja publik. Selain itu, insentif fiskal bagi mekanisme keuangan hijau berkontribusi dalam memperkuat pembiayaan sektor swasta untuk investasi hijau, serta mendukung perluasan proyek-proyek yang berkelanjutan secara lingkungan. Lebih lanjut, *green fiscal policies* dapat meningkatkan pendapatan publik yang dapat dialokasikan untuk investasi hijau, reformasi fiskal yang lebih luas, atau sektor prioritas lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.

Green fiscal policies memiliki dampak yang bersifat interdisipliner dan dapat menghasilkan efek positif pada dimensi ekonomi, keuangan, dan sosial. Penggunaan instrumen kebijakan fiskal untuk berbagai tujuan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Dalam konteks ini, seiring dengan implementasi *green fiscal policies*, beberapa capaian dapat diwujudkan, yaitu: (1) mengurangi penggunaan bahan bakar fosil; (2) mengurangi emisi karbon; (3) mempercepat transisi menuju sumber daya berkelanjutan melalui insentif hijau; (4) menciptakan lapangan kerja hijau dan meningkatkan ketenagakerjaan; (5) meningkatkan efisiensi energi; (6) mempercepat transisi menuju metode produksi dan konsumsi hijau untuk transformasi ekonomi hijau melalui *green public procurement*; dan (7) melakukan investasi dalam transformasi digital hijau untuk menghilangkan biaya fisik.

Tabel 3. Harmonisasi Kebijakan Fiskal Menuju *Green Economy* yang Berkelanjutan

Contoh Ketidakharmonisan Kebijakan
Peningkatan subsidi bahan bakar fosil sementara pajak lingkungan diterapkan
Penggunaan bahan bakar fosil oleh konsumen dikenai pajak, sementara penggunaan bahan bakar fosil oleh industri untuk pembangkit listrik memperoleh pembebasan pajak
Pengenaan pajak yang lebih tinggi pada kendaraan berbahan bakar fosil dibandingkan kendaraan listrik atau <i>hybrid</i>
Bahan bakar kendaraan berbasis fosil dikenai pajak tinggi, sementara bahan bakar untuk moda transportasi beremisi karbon tinggi seperti pesawat dan kapal dikenai pajak lebih rendah
Insentif pajak diterapkan pada sektor beremisi karbon tinggi, sementara sektor pertanian tidak memperoleh insentif yang memadai

Sumber: UNDESA, 2012

ECONOMIE

Kebijakan fiskal memiliki berbagai instrumen, dan instrumen-instrumen tersebut harus selaras secara politis satu sama lain. Jika tidak, pencapaian transformasi *green economy* tidak dapat diharapkan. Oleh karena itu, di bawah arahan pemerintah dan organisasi internasional, batas antara tujuan keuangan dan non-keuangan perlu dijaga dalam praktik kebijakan (Yan et al., 2023).

Studi Kasus: Swedia

Swedia merupakan salah satu negara yang paling sering dijadikan rujukan dalam literatur internasional terkait keberhasilan penerapan kebijakan fiskal hijau (*green fiscal policies*) untuk mendorong transformasi menuju *green economy*. Keberhasilan tersebut terutama ditopang oleh penerapan pajak karbon (*carbon dioxide/CO₂ tax*) yang telah diberlakukan sejak tahun 1991 sebagai bagian dari reformasi pajak nasional yang komprehensif (Hammar & Åkerfeldt, 2011). Pajak CO₂ di Swedia dirancang sebagai instrumen ekonomi utama untuk menginternalisasi eksternalitas lingkungan yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan bakar fosil. Dengan menerapkan Polluter Pays Principle, kebijakan ini memastikan bahwa biaya sosial dan lingkungan akibat emisi karbon ditanggung langsung oleh pihak yang menghasilkan emisi, sehingga harga energi mencerminkan biaya lingkungan yang sesungguhnya (Hammar & Åkerfeldt, 2011). Pendekatan ini sejalan dengan kerangka *green economy* yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan emisi, serta pergeseran menuju jalur pembangunan rendah karbon (UNEP, 2011; OECD, 2023).

Dari sisi desain kebijakan, pajak karbon Swedia memiliki beberapa karakteristik penting. *Pertama*, pajak CO₂ diperkenalkan sejak awal sebagai bagian dari reformasi pajak besar, sehingga terintegrasi dengan sistem perpajakan yang sudah ada, khususnya pajak energi. *Kedua*, tarif pajak CO₂ ditingkatkan secara bertahap dari waktu ke waktu, yang memungkinkan rumah tangga dan pelaku usaha menyesuaikan perilaku produksi dan konsumsi mereka secara progresif. Pendekatan bertahap ini meningkatkan penerimaan politik (*political feasibility*) serta mengurangi potensi guncangan ekonomi jangka pendek (Hammar & Åkerfeldt, 2011). *Ketiga*, dalam rangka menjaga daya saing industri dan meminimalkan risiko *carbon leakage*, Swedia menerapkan tarif pajak CO₂ yang lebih rendah bagi sektor-sektor tertentu yang berorientasi ekspor dan rentan terhadap persaingan internasional. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal hijau tidak bersifat seragam (*one-size-fits-all*), melainkan disesuaikan dengan struktur ekonomi nasional. Seiring dengan implementasi European Union Emissions Trading System (EU ETS), Swedia juga menyesuaikan kebijakan pajak karbon nasionalnya agar tetap konsisten dan tidak menimbulkan tumpang tindih instrumen kebijakan (Hammar & Åkerfeldt, 2011; Government Offices of Sweden, 2023).

Dari perspektif administratif, pajak karbon Swedia relatif mudah diterapkan dan memiliki biaya administrasi yang rendah. Pajak tidak didasarkan pada pengukuran emisi aktual, melainkan pada kandungan karbon rata-rata bahan bakar, sehingga menyederhanakan sistem pemungutan pajak

ECONOMIE

dan meningkatkan efisiensi administrasi fiskal. Pendekatan ini juga memastikan netralitas teknologi dan bahan bakar, karena setiap bahan bakar fosil dikenai pajak secara proporsional terhadap emisi CO₂ yang dihasilkan (Hammar & Åkerfeldt, 2011).

Dampak kebijakan fiskal hijau Swedia terhadap transformasi *green economy* terlihat secara signifikan pada perubahan struktur energi nasional. Pajak CO₂ berkontribusi pada penurunan konsumsi bahan bakar fosil dan mendorong peralihan ke energi terbarukan, khususnya biomassa, tenaga air, dan pemanfaatan limbah sebagai sumber energi. Sektor pemanas distrik (*district heating*) menjadi contoh konkret bagaimana instrumen fiskal dapat mendorong substitusi bahan bakar fosil dengan sumber energi rendah karbon secara efektif (Hammar & Åkerfeldt, 2011; Swedish Energy Agency, 2011). Lebih jauh, pengalaman Swedia menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal hijau tidak menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 1990–2007, Swedia berhasil menurunkan emisi gas rumah kaca sekitar 9% sementara pada saat yang sama mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 50%. Temuan ini mengindikasikan adanya decoupling antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon, yang merupakan tujuan utama dari *green economy* dan sustainability (Hammar & Åkerfeldt, 2011; OECD, 2023). Pendapatan yang dihasilkan dari pajak karbon di Swedia masuk ke dalam anggaran umum negara dan tidak secara khusus di- *earmark*. Namun demikian, dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebijakan iklim lainnya, mengurangi dampak distribusi yang tidak diinginkan dari pajak lingkungan, serta mendanai investasi publik hijau. Dengan demikian, kebijakan fiskal hijau di Swedia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian emisi, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat keberlanjutan fiskal dan mendukung transformasi ekonomi hijau secara menyeluruh (Government Offices of Sweden, 2023; OECD, 2023). Berdasarkan studi kasus ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal hijau memainkan peran strategis dalam mendorong *green economy* apabila dirancang secara komprehensif, bertahap, dan terintegrasi dengan kebijakan energi serta iklim lainnya.

Kesimpulan

1) Kesimpulan

Green Economy tidak hanya mengurangi dampak produksi dan konsumsi terhadap lingkungan. Ekonomi hijau didasarkan pada konsep pertumbuhan hijau -pembangunan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang ramah lingkungan. *Green Economy* adalah sistem ekonomi berputar yang berorientasi pada lingkungan yang menargetkan tujuan lingkungan (tujuan utama) dan meningkatkan kesejahteraan dan manfaat sosial (tujuan sekunder). Transformasi *green Economy* dapat dicapai melalui kebijakan ekonomi hijau dan instrumen-instrumennya. Di antara instrumen-instrumen ini, *green fiscal policies*, yang mencakup instrumen fiskal, memiliki kekuatan politik untuk mempercepat transformasi *green economy* dan bahkan memiliki koefisien

ECONOMIE

pengganda (*multiplier coefficient*). Namun, *green fiscal policies* harus diimplementasikan dengan cara yang sepenuhnya mencakup *green economy* dan harmonisasi kebijakan harus efisien dan efektif. Jika tidak, implementasi dapat saling menetralkan dan menyebabkan kurangnya efektivitas kebijakan atau bahkan ketidaksempurnaan.

2) Saran

Pemerintah perlu terus mengembangkan dan memperkuat *green fiscal policies* yang memberikan insentif yang jelas bagi pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam teknologi dan praktik yang ramah lingkungan dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting sehingga dapat membantu mempercepat adopsi praktik-praktik berkelanjutan di sektor ekonomi yang berbeda. Serta bagi penulis berikutnya, disarankan untuk memaparkan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya *green fiscal policies*. Selain itu, disarankan untuk menambah variabel yang berkaitan dengan kolaborasi masyarakat dan investor sehingga *green fiscal policies* dapat berjalan dengan efektif dan optimal.

Daftar Pustaka

- Enel X. (2023). *What Is Green Economy? Definition and Meaning*. Diakses dari <https://corporate.enelx.com/en/question-and-answers/what-is-green-economy>
- European Union. (2023). *Inclusive Green Economy*. Diakses dari <https://op.europa.eu>
- GFPN. (2023). *Green Fiscal Policies*. Diakses dari <https://greenfiscalspolicy.org/green-fiscal-policies/>
- Green Policy Platform. (2023). *Explore Green Growth*. Diakses dari <https://www.greenpolicyplatform.org/page/explore-greengrowth>
- Hammar, H., & Åkerfeldt, S. (2011). *CO₂ Taxation in Sweden: 20 Years of Experience and Looking Ahead*. Ministry of Finance, Sweden.
- INTOSAI. (2016). *Market Based Instruments for Environmental Protection and Management*. The Audit Board of the Republic of Indonesia.
- International Labour Organization. (2022). *Decent work in the Green Economy*. ILO.
- Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia. (2022). *Green Economy Policy and Strategy*. Government of Georgia.
- OECD. (2011). *Towards Green Growth*. OECD Publishing. Diakses dari <https://doi.org/10.1787/9789264111318-en>
- OECD. (2023). *Green Growth and Taxation*. Diakses dari <https://www.oecd.org/greengrowth/greengrowthandtaxation.htm>

ECONOMIE

- Söderholm, P. (2020). The Green Economy Transition: The Challenges of Technological Change for Sustainability. *Sustainable Earth*, 6(20). Diakses dari <https://www.arup.com/perspectives/a-new-understanding-of-the-green-economy>
- Swedish Energy Agency. (2011). *Energy in Sweden 2010*.
- UN Department of Economic and Social Affairs. (2012). *A Guidebook to the Green Economy: Issue 3 – Exploring Green Economy Policies and International Experience with National Strategies*. United Nations.
- UN Economic Commission for Europe. (2023). *Green Economy*. Diakses dari <https://unece.org/green-economy-3>
- UN Environment Programme. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A Synthesis for Policy Makers*. UNEP.
- UN Environment Programme. (2023). *Green Economy*. Diakses dari <https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-efficiency/green-economy>
- World Bank. (2011). *From Growth to Green Growth: A Framework*. World Bank.
- Yan, H., Qamruzzaman, Md., & Kor, S. (2023). Nexus between Green Investment, Fiscal Policy, Environmental Tax, Energy Price, Natural Resources, and Clean Energy: A Step Towards Sustainable Development by Fostering Clean Energy Inclusion. *Sustainability*, 15(18), 13591. Diakses dari <https://doi.org/10.3390/su151813591>